

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

5.1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

5.1.1. Dasar Hukum

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Selanjutnya dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan TP.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, bahwa dana TP merupakan dana APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan TP. Dana TP Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa.

5.1.2. Dana dan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui SKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 87.704.976.000,00 terdiri dari yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp39.340.970.000,00 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp8.051.853.000,00 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.045.790.000,00, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp7.000.000.000,00 dan Kementerian Pertanian sebesar Rp31.266.363.000,00 secara keseluruhan realisasi penggunaan dana TP TA. 2011 yang dikelola SKPD/ SATKER Provinsi Jambi adalah sebesar Rp65.082.601.000,00 atau 74,21%.

Tabel 5.1. Dana TP Yang Dikelola SKPD Provinsi Jambi TA. 2011

No	SKPD/ Satker	K/L Pemberi Dana TP	Total Dana (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	(%)
1.	Disosnakestrans	Kemenakertras	6.904.783	6.127.770	88,75
	BPTT	Kemensos	1.147.070	756.776	65,97
2.	Dinas Pertanian TP	Kementan	2.110.000	129.676	6,15
3.	Dinas Perkebunan	Kementan	8.593.816	8.065.757	93,86
4.	Disnak dan Keswan	Kementan	17.284.847	3.376.308	19,53
5.	Badan Ketahanan Pangan	Kementan	3.277.700	1.072.008	32,71

No	SKPD/ Satker	K/L Pemberi Dana TP	Total Dana (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	(%)
6.	Dinas PU	Kemen PU	39.340.970	37.115.771	94,34
7.	Dinas Kelautan Perikanan	Kemen KP	2.045.790	1.717.821	83,97
8.	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	Kemenbudpar	7.000.000	6.720.714	96,01
J u m l a h			87.704.976	65.082.601	

Sumber: Bappeda Provinsi Jambi, 2012 (data diolah)

5.1.3. Satuan Kerja Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan TP terdiri dari 8 SKPD yaitu; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (Bakorluh KP), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

5.1.4. Program Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

A. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi

Pada tahun 2011 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mendapatkan dana TP dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp8.051.853.000,00 dengan realisasi Rp6.884.546.000,00 atau 85,50 % yang digunakan untuk mendanai 4 program 5 kegiatan:

- 1. Program pemberdayaan fakir miskin, komoditas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah sosial dengan 1 kegiatan yaitu** Kegiatan pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan pemberdayaan komunitas dengan dana sebesar Rp2.197.750.000,00 yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil di Provinsi Jambi. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp 2.112.296.200,00 atau 96,11%.
- 2. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dengan 1 kegiatan yaitu** Kegiatan Penyelenggaraan pencarian dan penyelamatan musibah, bencana alam dan bencana lainnya, dengan dana sebesar Rp842.668.000,00 yang digunakan untuk operasional tugas pembantuan dan terbantunya para korban bencana di Provinsi Jambi. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp 841.468.000,00 atau 99,86 %.
- 3. Program pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh** terdiri dari 2 kegiatan dengan dana sebesar Rp3.864.365.000,00 untuk mendanai kegiatan; 1) Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKT), 2) Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (PMKT). Realisasi penggunaan dana untuk program ini adalah sebesar Rp3.174.006.250,00 atau 82,14 %.

- 4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,** hanya terdapat 1 kegiatan dengan dana sebesar Rp 1.147.070.000,00 untuk mendanai kegiatan Peningkatan fungsi dan revitalisasi BLK menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi. Dana ini digunakan untuk kegiatan pembangunan kios dan peralatan gedung 3 in 1 serta operasional di Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (BPTT). Realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp756.776.000,00 atau 65,97 %.

B. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi

Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan di Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi adalah sebesar Rp 2.110.000.000,00 untuk mendanai 2 program yaitu:

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada berkelanjutan

Pagu anggaran untuk mendanai program ini adalah sebesar Rp210.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 129.676.000,00 atau sebesar 61,75% untuk kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan.

2. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Eksport Hasil Pertanian

Pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar RP499.980.000,00 atau sebesar 99,99% untuk kegiatan pengembangan pemasaran domestik.

C. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi pada tahun 2011 mendapatkan dana TP dari Kementerian Pertanian sebesar Rp8.593.816.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.065.757.000,00 atau 93,86%.

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut:

- 1). Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar terdiri dari sub kegiatan:
 - a). Perluasan peremajaan dan rehabilitasi tanaman kopi yaitu perluasan tanaman kopi Arabika di Kota Sei Penuh seluas 25 Ha.
 - b). Pengawalan, Pembinaan dan Pendampingan kegiatan tanaman rempah dan penyegar yang terdiri dari:
 - Pengawalan kegiatan pengembangan kopi di Kota Sungai penuh dan Kabupaten Kerinci.
 - Pengawalan kegiatan pengembangan teh organik di Kabupaten Kerinci.
 - Pengawalan kegiatan pengembangan tanaman perkebunan

- 2). Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan
 - a). Peremajaan tanaman kelapa sawit merupakan pengembangan model peningkatan produksi kelapa sawit dan peningkatan produktivitas kelapa sawit rakyat melalui pemanfaatan bibit unggul.
 - b). Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Revitalisasi (Kelapa sawit – ternak) yaitu terdiri dari:
 - Sinkronisasi dan koordinasi kegiatan revitalisasi perkebunan
 - Pengawasan kegiatan revitalisasi perkebunan seluas 500 ha di Kabupaten Bungo.
 - Pengawasan kegiatan revitalisasi perkebunan seluas 500 ha di Kabupaten Merangin.
 - Pengawasan kegiatan revitalisasi perkebunan seluas 1.683 ha di Kabupaten Muaro Jambi.
 - Pengawasan kegiatan revitalisasi perkebunan seluas 500 ha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - Pengawasan kegiatan revitalisasi perkebunan seluas 1.200 ha di Kabupaten Tebo.
 - c). Integrasi tanaman tahunan ternak di Kabupaten Muaro Jambi
 - d). Pembangunan dan pemeliharaan kebutuhan sumber bahan tanaman tahunan yaitu pemeliharaan tanaman jarak pagar di Kabupaten Muaro Jambi.
 - e). Pengawasan, pembinaan dan pendampingan kegiatan tanaman tahunan terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pengawasan untuk kegiatan revitalisasi perkebunan
 - Pengawasan kegiatan integrasi tanaman tahunan ternak
 - Pengawasan peremajaan tanaman tahunan non revitalisasi (karet, Kelapa sawit).
- 3). Dukungan Penyediaan Benih Unggul Bermutu dan Sarana Produksi Perkebunan
 - a). Peningkatan penanganan pasca-panen tanaman tahunan
 - b). Fasilitasi pencegahan gangguan usaha perkebunan dan konflik melalui pertemuan koordinasi penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)
- 4). Dukungan Perlindungan dan Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)
 - a). Pertemuan koordinasi pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim.
 - b). Fasilitasi pemantauan kebakaran, dampak perubahan iklim dan bencana alam di Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjab Timur, Kabupaten Tebo dan di Provinsi Jambi.
 - c). Sosialisasi PLTB dan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjab Timur, dan Kabupaten Tebo.

- 5). Pengawasan, pembangunan dan pendampingan kegiatan perlindungan perkebunan.
 - a). Dukungan manajemen dan teknis lainnya Ditjenbun dengan peningkatan kapabilitas pegawai/petugas dengan cara pembinaan, pengawalan dan monitoring evaluasi (PMD) dan pemberdayaan kelembagaan petani perkebunan di 6 Kab di Provinsi Jambi.
 - b). Pembinaan pengawasan, pendampingan dan monev kegiatan pembangunan perkebunan.
 - c). Sertifikasi, pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan melalui; pengawasan kegiatan sarana produksi perbenihan, sertifikasi benih dan pengawasan peredaran benih, insentif pengawas benih tanaman, fasilitasi rintisan RDKK pupuk bersubsidi di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tebo, bantuan penyediaan benih untuk pameran, penghijauan dan lain-lain, operasional PPNS, workshop pembangunan perkebunan, penyusunan data base perkebunan, serta pengawalan kegiatan perbenihan dan sarana produksi.

2. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Eksport Hasil Pertanian

- a. Pengembangan mutu dan standarisasi pertanian dengan penerapan sistem jaminan mutu hasil pertanian dan pengembangan mutu kopi.
- b. Pengembangan pengolahan hasil pertanian, unit usaha pengolahan hasil pertanian, pengembangan agroindustri minyak atsiri/kayu manis berupa pengembangan agroindustri minyak atsiri/kayu manis di Kabupaten Kerinci dan pengembangan agroindustri minyak nilam di Kabupaten Merangin.
- c. Pengembangan agroindustri bahan olah karet (BOKAR) berupa: pengembangan agroindustri bokar dan pasar lelang di Kabupaten Batanghari, pengembangan agroindustri Bokar di Kabupaten Merangin, Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo.
- d. Pengembangan agroindustri tebu dan gula aren yaitu pengembangan usaha pengolahan hasil tebu di Kabupaten Kerinci.

D. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi

Tugas Pembantuan provinsi yang diterima oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi bersumber dari alokasi anggaran Departemen Pertanian adalah sebesar Rp17.284.847.000,00 untuk mendanai :

1. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

- Peningkatan Produksi Ternak Non Ruminansia dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal dengan dana sebesar Rp12.297.127.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.213.901.000,00 atau 26,14%.

- Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal dengan dana sebesar Rp75.180.000,00 realisasi sebesar 0 %
- Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan dengan dana sebesar Rp750.000.000,00 dan realisasi dana sebesar Rp545.448.000,00 atau 72,73 %
- Dukungan Management dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dengan dana sebesar Rp122.740.000,00 dan realisasi dana sebesar Rp 105.362.000,00 atau 85,84%

2. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian

Pengembangan Pemasaran Domestik dengan dana sebesar Rp1.829.000.000,00.

E. Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Bakorluh KP Provinsi Jambi pada tahun 2011 mendapatkan dana TP dari Kementerian Pertanian sebesar Rp3.277.700.000,00 dengan realisasi Rp3.277.700.000,00 atau 100 % yang digunakan untuk:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- a) Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan dengan dana sebesar Rp2.363.000.000,00 realisasi sebesar Rp2.363.000.000,00 atau 100%.
- b) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar dengan dana sebesar Rp814.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp814.700.000 atau sebesar 100%.
- c) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan dengan dana sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi dana sebesar Rp100.000.000,00 atau sebesar 100%.

Kendala

Pada program/kegiatan pengembangan ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan adanya dana Bansos Rawan Pangan yang tidak disalurkan di 3 lokasi pada 3 Kabupaten dikarenakan daerah lokasi tersebut tidak ada bencana

Tindaklanjut

Diharapkan petugas Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten/Kota tetap melakukan pendataan dan analisis daerah yang berisiko rawan pangan

F. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada Tahun 2011 mendapatkan dana TP dari kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.045.790.000,00 yang di pergunakan untuk mendanai:

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

- Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan dengan dana sebesar Rp645.790.000,00 dengan realisasi sebesar Rp588.937.000,00 atau sebesar 91,20%.
- Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan dengan dana sebesar Rp1.400.000.000,00 atau sebesar 80,63%.

G. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi pada tahun 2011 mendapatkan dana TP dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp7.000.000.000,00 yang dipergunakan untuk mendanai:

Program Kesenjangan, Kepurbakalaan, Dan Permuseuman dengan kegiatan pengembangan pengelolaan permuseuman dengan realisasi Rp6.720.714.000,00 atau 96,01%.

H. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi pada tahun 2011 mendapatkan dana TP dari Kementrian Pekerjaan Umum sebesar Rp39.340.970.000,00 yang dipergunakan untuk mendanai:

1. Program Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dengan dana sebesar Rp36.795.420.000,00. Realisasi penggunaan dana TP tahun anggaran 2011 Program Penyelenggaraan Jalan tersebut adalah sebesar Rp34.589.577.000 atau sebesar 94,01 %.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana dengan dana sebesar Rp2.545.550.000,00. Realisasi penggunaan dana sebesar Rp2.526.195.000,00 atau sebesar 99,24%.

5.1.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Sebagian besar Satker/SKPD hanya menyampaikan laporan bulanan dan Sistem Akutansi Instansi, yang seharusnya dilaporkan Ke Bappeda adalah laporan Format C. Dengan isian Laporan Format C akan diketahui kendala dan permasalahan yang dihadapi. Satker/SKPD yang menyampaikan laporan dengan Format C, jarang sekali yang mengisi format C (3), walaupun mungkin ditemui permasalahan dan kendala di lapangan.
2. Sebagian besar dana Tugas Pembantuan diperuntukan bagi kegiatan fisik, maka keterlambatan yang disebabkan oleh adanya revisi anggaran, keterlambatan juklak/juknis atau DIPA baru terbit pada perubahan anggaran akan sangat mempengaruhi penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya
3. Adanya indikasi tumpang tindih antara kegiatan yang bersumber dari dana APBD dan APBN

Solusi

1. Perlu aturan yang tegas berupa *reward and punishman* kepada Satker/SKPD terhadap aturan pelaporan baik substansi, format dan periodisasi penyampaian laporan.
2. Pihak Departemen pemberi Tugas Pembantuan sebaiknya dalam penyerahan DIPA, penerbitan Pedoman Umum/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis tepat waktu.
3. Pihak Satker/SKPD perlu memberikan dokumen usulan Tugas Pembantuan kepada Bappeda serta menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan dana APBD dan APBN.